



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/31.1/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN ANGGARAN 2023**

WALIKOTA SUBULUSSALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dimaksud;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berjalan baik dan optimal, maka perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2023, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Subulussalam, yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembar Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembar Daerah Kota Subulussalam Nomor 85);
18. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsidan Tata Kerja Inspektorat Kota Subulussalam;

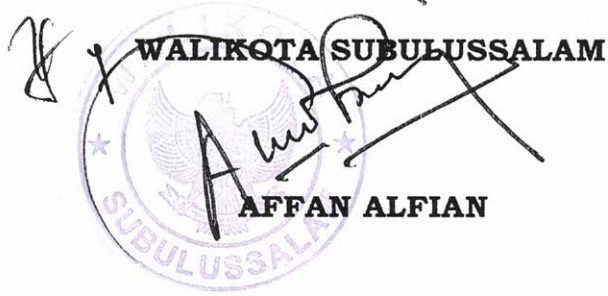
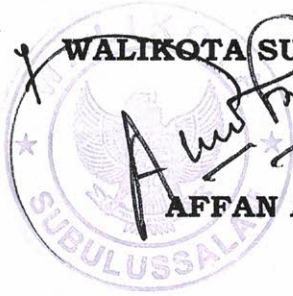
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Subulussalam Tahun 2023 ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU** dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Walikota Subulussalam yang diserahkan kepada Inspektur Kota Subulussalam.

- KETIGA** : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU** dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Subulussalam atas nama Walikota Subulussalam.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subulussalam
pada tanggal : 2 Februari 2023 M
11 Rajab 1444 H


WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KOTA SUBULUSSALAM

No	Nama Audit	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim		Anggaran Waktu (Hari)				Anggaran Biaya (Rp)				RMP	RPL	Laporan	Ket.
				Peran	Orang	DK	LK	JUM	DK	LK	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Reviu Perencanaan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024	Reviu	Unit Kerja Tahun 2023	PPJ	1	5	-	5	Rp 360.000	-	Rp 1.800.000	Januari	Januari	1			
				PB,PPJ	1	5	-	5	Rp 340.000	-	Rp 1.700.000						
				PT	1	5	-	5	Rp 340.000	-	Rp 1.700.000						
				KT	1	5	-	5	Rp 320.000	-	Rp 1.600.000						
				AT	3	5	-	15	Rp 270.000	-	Rp 4.050.000						
					7						Rp 10.850.000						
2	Reviu Kinerja Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2023	Reviu	Unit Kerja Tahun 2023	PPJ	1	20	-	20	Rp 360.000	-	Rp 7.200.000	Januari	Februari	1			
				PB,PPJ	1	20	-	20	Rp 340.000	-	Rp 6.800.000						
				PT	1	20	-	20	Rp 340.000	-	Rp 6.800.000						
				KT	1	20	-	20	Rp 320.000	-	Rp 6.400.000						
				AT	4	20	-	80	Rp 270.000	-	Rp 21.600.000						
					8						Rp 48.800.000						
3	Pengawasan Pelaksanaan Covid-19 Triwulan I Tahun 2023	Audit Operasional	Unit Kerja Tahun 2023	PPJ	1	5	-	5	Rp 360.000	-	Rp 1.800.000	Februari	Februari	1			
				PB,PPJ	1	5	-	5	Rp 340.000	-	Rp 1.700.000						
				PT	1	5	-	5	Rp 340.000	-	Rp 1.700.000						
				KT	1	5	-	5	Rp 320.000	-	Rp 1.600.000						
				AT	5	5	-	25	Rp 270.000	-	Rp 6.750.000						
					9						Rp 13.550.000						
4	Reviu Realisasi Dana Otonomi Khusus Aceh T.A. 2022	Reviu	Unit Kerja Tahun 2023	PPJ	1	10	-	10	Rp 360.000	-	Rp 3.600.000	Februari	Februari	1			
				PB,PPJ	1	10	-	10	Rp 340.000	-	Rp 3.400.000						
				PT	1	10	-	10	Rp 340.000	-	Rp 3.400.000						
				KT	1	10	-	10	Rp 320.000	-	Rp 3.200.000						
				AT	5	10	-	50	Rp 270.000	-	Rp 13.500.000						
					9						Rp 27.100.000						
5	Reviu Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022	Reviu	Unit Kerja Tahun 2023	PPJ	1	12	-	12	Rp 360.000	-	Rp 4.320.000	Februari	Maret	1			
				PB,PPJ	1	12	-	12	Rp 340.000	-	Rp 4.080.000						
				PT	1	12	-	12	Rp 340.000	-	Rp 4.080.000						
				KT	1	12	-	12	Rp 320.000	-	Rp 3.840.000						
				AT	5	12	-	60	Rp 270.000	-	Rp 16.200.000						
					9						Rp 32.520.000						
6	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota	Reviu	Unit Kerja Tahun	PPJ	1	10	-	10	Rp 360.000	-	Rp 3.600.000						

Subulussalam T.A.2022		2023		PB,PPJ PT KT AT	1 1 1 5 9	10 10 10 10 10	- - - - -	10 10 10 50 270.000	Rp Rp Rp Rp Rp	340.000 340.000 320.000 270.000 -	- - - - -	Rp Rp Rp Rp Rp	3.400.000 3.400.000 3.200.000 13.500.000 27.100.000	Februari	Maret	1	
7	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Subulussalam	Unit Kerja Tahun 2023	Reviu	PPJ PB,PPJ PT KT AT	1 1 1 1 4 8	7 7 7 7 7 7	- - - - - -	7 7 7 7 28 270.000	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	360.000 340.000 340.000 320.000 270.000 -	- - - - - -	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	2.520.000 2.380.000 2.380.000 2.240.000 7.560.000 17.080.000	Februari	Maret	1	
8	Pemeriksaan reguler Anggaran Pendapatan Belanja Kampong (APBK) Tahun Anggaran 2023	Unit Kerja Tahun 2023	Audit Operasional	PPJ PB,PPJ PT KT AT	3 3 3 3 11 23	10 10 10 10 10 10	- - - - - -	30 30 30 30 110 270.000	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	360.000 340.000 340.000 320.000 270.000 -	- - - - - -	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	10.800.000 10.200.000 10.200.000 9.600.000 29.700.000 70.500.000	Maret	Maret	3	
9	Reviu Laporan Kinerja Kota Subulussalam Tahun 2022	Unit Kerja Tahun 2023	Reviu	PPJ PB,PPJ PT KT AT	1 1 1 1 4 8	5 5 5 5 5 5	- - - - - -	5 5 5 5 20 270.000	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	360.000 340.000 340.000 320.000 270.000 -	- - - - - -	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	1.800.000 1.700.000 1.700.000 1.600.000 5.400.000 12.200.000	Maret	April	1	
10	Reviu Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Triwulan I Tahun Anggaran 2023	Unit Kerja Tahun 2023	Reviu	PPJ PB,PPJ PT KT AT	1 1 1 1 3 7	10 10 10 10 10 10	- - - - - -	10 10 10 10 30 360.000	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	360.000 340.000 340.000 320.000 270.000 -	- - - - - -	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	3.600.000 3.400.000 3.400.000 3.200.000 8.100.000 21.700.000	April	April	1	
11	Reviu HPS terhadap 10 (sepuluh) Proyek Strategis Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2023	Unit Kerja Tahun 2023	Reviu	PPJ PB,PPJ PT KT AT	1 1 1 1 8 12	15 15 15 15 15 15	- - - - - -	15 15 15 15 120 360.000	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	360.000 340.000 340.000 320.000 270.000 -	- - - - - -	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	5.400.000 5.100.000 5.100.000 4.800.000 32.400.000 52.800.000	April	Mei	1	
12	Probit Audit terhadap 10 (sepuluh) Proyek Strategis sampai dengan tahap perencanaan Pemerintahan Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2023	Unit Kerja Tahun 2023	Audit Operasional	PPJ PB,PPJ PT KT AT	2 2 2 2 7 15	15 15 15 15 15 15	- - - - - -	30 30 30 30 105 360.000	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	360.000 340.000 340.000 320.000 270.000 -	- - - - - -	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	10.800.000 10.200.000 10.200.000 9.600.000 28.350.000 69.150.000	April	Mei	10	
13	Reviu Kepatuhan BMD terhadap regulasi pengelolaan BMD	Unit Kerja Tahun	Reviu	PPJ	1	10	-	10	Rp	360.000	-	-	Rp	3.600.000			

			2023	PB,PPJ	1	10	-	10	Rp	340.000	-	Rp	3.400.000	Mei	1	
				PT	1	10	-	10	Rp	340.000	-	Rp	3.400.000			
				KT	1	10	-	10	Rp	320.000	-	Rp	3.200.000			
				AT	3	10	-	30	Rp	270.000	-	Rp	8.100.000			
					7							Rp	21.700.000			
14	Reviu Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Reviu atas Rotasi, Promosi dan Mutasi ASN	Reviu	Unit Kerja Tahun 2023	PPJ	1	10	-	10	Rp	360.000	-	Rp	3.600.000			
				PB,PPJ	1	10	-	10	Rp	340.000	-	Rp	3.400.000			
				PT	1	10	-	10	Rp	340.000	-	Rp	3.400.000	Mei	1	
				KT	1	10	-	10	Rp	320.000	-	Rp	3.200.000			
				AT	4	10	-	40	Rp	270.000	-	Rp	10.800.000			
					8							Rp	24.400.000			
15	Reviu Kinerja UKPBJ pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sekretariat Daerah Kota Subulussalam, dan Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	Reviu	Unit Kerja Tahun 2023	PPJ	1	10	-	10	Rp	360.000	-	Rp	3.600.000			
				PB,PPJ	1	10	-	10	Rp	340.000	-	Rp	3.400.000			
				PT	1	10	-	10	Rp	340.000	-	Rp	3.400.000	Mei	1	
				KT	1	10	-	10	Rp	320.000	-	Rp	3.200.000			
				AT	4	10	-	40	Rp	270.000	-	Rp	10.800.000			
					8							Rp	24.400.000			
16	Audit Kinerja SKPK Tahun Anggaran 2022	Audit Kinerja	Unit Kerja Tahun 2023	PPJ	2	10	-	20	Rp	360.000	-	Rp	7.200.000			
				PB,PPJ	2	10	-	20	Rp	340.000	-	Rp	6.800.000			
				PT	2	10	-	20	Rp	340.000	-	Rp	6.800.000	2		
				KT	2	10	-	20	Rp	320.000	-	Rp	6.400.000			
				AT	10	10	-	100	Rp	270.000	-	Rp	27.000.000			
					18							Rp	54.200.000			
17	Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024	Reviu	Unit Kerja Tahun 2023	PPJ	1	10	-	10	Rp	360.000	-	Rp	3.600.000			
				PB,PPJ	1	10	-	10	Rp	340.000	-	Rp	3.400.000			
				PT	1	10	-	10	Rp	340.000	-	Rp	3.400.000	1		
				KT	1	10	-	10	Rp	320.000	-	Rp	3.200.000			
				AT	4	10	-	40	Rp	270.000	-	Rp	10.800.000			
					8							Rp	24.400.000			
18	Reviu Standar Harga Satuan (SHS), dan Analisis Standar Biaya (ASB) Tahun Anggaran 2024	Reviu	Unit Kerja Tahun 2023	PPJ	1	10	-	10	Rp	360.000	-	Rp	3.600.000			
				PB,PPJ	1	10	-	10	Rp	340.000	-	Rp	3.400.000			
				PT	1	10	-	10	Rp	340.000	-	Rp	3.400.000	1		
				KT	1	10	-	10	Rp	320.000	-	Rp	3.200.000			
				AT	4	10	-	40	Rp	270.000	-	Rp	10.800.000			
					8							Rp	24.400.000			
19	Reviu Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Trwulan II Tahun Anggaran 2023	Reviu	Unit Kerja Tahun 2023	PPJ	1	10	-	10	Rp	360.000	-	Rp	3.600.000			
				PB,PPJ	1	10	-	10	Rp	340.000	-	Rp	3.400.000			
				PT	1	10	-	10	Rp	340.000	-	Rp	3.400.000	1		
				KT	1	10	-	10	Rp	320.000	-	Rp	3.200.000			
				AT	3	10	-	30	Rp	270.000	-	Rp	8.100.000			
					7							Rp	21.700.000			
20	Reviu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon	Reviu	Unit Kerja Tahun	PPJ	1	10	-	10	Rp	360.000	-	Rp	3.600.000			

	Anggaran Semester (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2024	2023	PB, PPJ PT KT AT	1 1 1 4 8	10 10 10 10 10	- - - - -	10 10 10 10 10	Rp Rp Rp Rp Rp 24.400.000	Juli Juli Juli Juli Juli	1 	Rp Rp Rp Rp Rp 27.100.000
21	Reviu Realisasi Dana Otonomi Khusus Aceh Tahap I T.A. 2023	Reviu Unit Kerja Tahun 2023	PPJ PB, PPJ PT KT AT	1 1 1 1 5 9	10 10 10 10 10 10	- - - - -	10 10 10 10 10 10	Rp 360.000 Rp 340.000 Rp 340.000 Rp 320.000 Rp 270.000 Rp 27.100.000	Juli 	1 	Rp 3.600.000 Rp 3.400.000 Rp 3.400.000 Rp 3.200.000 Rp 13.500.000 Rp 27.100.000
22	Reviu Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap I Tahun Anggaran 2023	Reviu Unit Kerja Tahun 2023	PPJ PB, PPJ PT KT AT	1 1 1 1 5 9	10 10 10 10 10 10	- - - - -	10 10 10 10 10 10	Rp 360.000 Rp 340.000 Rp 340.000 Rp 320.000 Rp 270.000 Rp 27.100.000	Juli 	1 	Rp 3.600.000 Rp 3.400.000 Rp 3.400.000 Rp 3.200.000 Rp 13.500.000 Rp 27.100.000
23	Reviu Pelayanan Publik yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, dan Dana Transfer Tahun Anggaran 2023	Reviu Unit Kerja Tahun 2023	PPJ PB, PPJ PT KT AT	1 1 1 1 5 9	10 10 10 10 10 10	- - - - -	10 10 10 10 10 10	Rp 360.000 Rp 340.000 Rp 340.000 Rp 320.000 Rp 270.000 Rp 27.100.000	September 	1 	Rp 3.600.000 Rp 3.400.000 Rp 3.400.000 Rp 3.200.000 Rp 13.500.000 Rp 27.100.000
24	Reviu Bantuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023	Reviu Unit Kerja Tahun 2023	PPJ PB, PPJ PT KT AT	1 1 1 1 5 9	10 10 10 10 10 10	- - - - -	10 10 10 10 10 10	Rp 360.000 Rp 340.000 Rp 340.000 Rp 320.000 Rp 270.000 Rp 27.100.000	September 	1 	Rp 3.600.000 Rp 3.400.000 Rp 3.400.000 Rp 3.200.000 Rp 13.500.000 Rp 27.100.000
25	Reviu Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Triwulan III Tahun Anggaran 2023	Reviu Unit Kerja Tahun 2023	PPJ PB, PPJ PT KT AT	1 1 1 1 3 7	10 10 10 10 10 10	- - - - -	10 10 10 10 10 10	Rp 360.000 Rp 340.000 Rp 340.000 Rp 320.000 Rp 270.000 Rp 21.700.000	Oktober 	1 	Rp 3.600.000 Rp 3.400.000 Rp 3.400.000 Rp 3.200.000 Rp 8.100.000 Rp 21.700.000
26	Reviu Realisasi Dana Otonomi Khusus Aceh Tahap II T.A. 2023	Reviu Unit Kerja Tahun 2023	PPJ PB, PPJ PT KT AT	1 1 1 1 5 9	10 10 10 10 10 10	- - - - -	10 10 10 10 10 10	Rp 360.000 Rp 340.000 Rp 340.000 Rp 320.000 Rp 270.000 Rp 27.100.000	Oktober 	1 	Rp 3.600.000 Rp 3.400.000 Rp 3.400.000 Rp 3.200.000 Rp 13.500.000 Rp 27.100.000
27	Reviu Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap II	Reviu Unit Kerja Tahun	PPJ	1	10	-	10	Rp 360.000			Rp 3.600.000

Tahun Anggaran 2023		2023	PB,PPJ PT KT AT	1 1 1 5 9	10 10 10 10 10	- - - - -	10 10 10 50 50	Rp Rp Rp Rp Rp	340.000 340.000 320.000 270.000 -	- - - - -	Rp Rp Rp Rp Rp	3.400.000 3.400.000 3.200.000 13.500.000 27.100.000	Oktober	Oktober	1		
28	Pemeriksaan Reguler SKPK Tahun Anggaran 2022	Audit Operasional	Unit Kerja Tahun 2023	PPJ PB,PPJ PT KT AT	5 5 5 5 18 38	10 10 10 10 10 10	- - - - - -	50 50 50 50 180 180	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	360.000 340.000 340.000 320.000 270.000 -	- - - - - -	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	18.000.000 17.000.000 17.000.000 16.000.000 48.600.000 116.600.000	Oktober	November	5	



 WALIKOTA SUBULUSSALAM

 AFFAN ALFIAN